PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH ORGANISASI AKAR RUMPUT (KASUS PERAN KOPERASI KELOMPOK PENGAJIAN DI DESA SRIWULAN KABUPATEN DEMAK)

Sri Untari
SMP Negeri 1 Sayung Kabupaten Demak

Abstract

This study shows that the empowerment of local women through the organization formed by their own efforts more effective than others who come from outside their community. The village is a village Sriwulan transition from traditional culture to modern culture. These changes are marked by the emergence of local institutions, namely the organization of grass-roots organizations (grassroots organizations) are diverse and have an important role in community empowerment. Local institutions appear on the initiative of the community and have a real agenda to strengthen the public welfare efforts. An important found role in this research is a study group of mothers who do women's empowerment activities of its members, not just on matters of religion, but also social issues, economics, and art.

Key words: Empowerment of women, the organization of grass-roots

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun, dalam kenyataan kesenjangan sosial terlihat sangat jelas dan menjadi masalah sulit dipecahkan secara mendasar. Krisis ekonomi yang melanda negara sejak tahun 1990-an dan belum tuntas hingga saat ini lebih memperparah keadaan. Menyadari hal ini maka harus dicari jalan keluarnya. Hal ini Konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat adalah perlunya mengali potensi masyarakat untuk membangun (*impowering*) dari dalam.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi pembangunan sangat tepat untuk mengerakkan dinamika masyarakat dalam memenuhi kebuthan hidupnya. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu belas kasihan dari para elite dan tidak lagi bergantung pada pemerintah tanpa adanya suatu inisiatif, kreativitas, dan swadaya. Di antara masyarakat yang perlu diberdayakan adalah perempuan yang pada umumnya dipandang sebagai makhluk yang lemah tak berdaya dan berhubungan erat dengan urusan domestik.

Menurut Kasmawati (2007: 3), kondisi perempuan Indonesia, dalam beberapa aspek masih sangat memprihatinkan, yakni di bidang pendidikan, angka buta huruf perempuan 14,5% lebih besar dari laki-laki yaitu 6,9%; di bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama dan masih tingginya angka kematian ibu (AKI), yaitu 307 per seratus ribu kelahiran hidup; dan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) dari pada perempuan (50,2%).

Upaya pemberdayaan perempuan tidak lepas dari keberadaan dan peranan

Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau Non Governmental Organization (NGO) yang tersebar baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Di antara Ornop tersebut adalah apa yang disebut dengan organisasi akar rumput atau *grass root organization* (GRO). Organisasi yang terakhir ini adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di antara warga masyarakat setempat secara sukarela, baik berdasarkan kepentingan, kebutuhan, maupun tujuan tertentu. Ciri menonjol dari organisasi ini adalah kepeduliannya pada masalah warga setempat atau lokal. Hal inilah yang membedakannya dengan Ornop lain ataupun LSM lainnya yang biasanya memiliki jaringan di tingkat regional, nasional, bahkan Internasional.

Sebagaiman ornop-ornop lain, GRO's sebagai organisasi masyarakat yang angat heterogen atau beraneka ragam, tetapi pada dasarnya mereka ingin memperjuangkan tujuannya hingga menjadi kenyataan, yaitu masyarakat adil dan sejahtera. GRO's dewasa ini membangun sebuah citra tersendiri dalam menciptakan suatu institusi pemberdayaan masyarakat. GRO's dipandang memiliki keunggulan dibandingkan dengan organisasi masyarakat lainnya. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat ditunjukkan melalui bagan 1.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) yang kehadirannya sangat dipopulerkan oleh Friedmann, muncul karena adanya dua premis mayor, yaitu "*kegagalan*" dan "*harapan*". *Kegagalan* yang dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam mananggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. *Harapan*, lahir karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan unsur-unsur demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan tersebut, menurut Friedmann, bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan

Bagan 1
Model-model Pendekatan Pengembangan Sosial Ekonomi Pedesaan

Prinsip Mekanisme	Pemerintah (*Government*)	Pasar(*Market*)	GROs/NGOs
Pengambilan keputusan anggota	Pejabat Pemerintah	Produsen, Pelanggan, atau Penguasa	Pemimpin dan dan Penanam sahan
Petunjuk untuk Pelaksanaan	Peraturan	Harga dan penyesuaian jumlah	Persetujuan bersama
Kriteria dasar Keputusan	Kebijakan umum dan kemudahan	Efisiensi, maksimalisasi, dan keuntungan implementasi	Terpenuhinya kepentingan anggota
Sanksi atau Pengendalian	Kebijakan dan paksaan	Tekanan finansial	Tekanan sosial
Model Operasi	Top-down	Individual	Buttom-up

Sumber: Uphoff, 1993 (telah diolah sendiri oleh penulis) cemin dari konsep normatif dan moral. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan pada hakikatnya merupakan nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Sebagai suatu konsep alternatif dalam entitas pembangunan masyarakat, pemberdayaan memberikan tekanan pada adanya otonomi dalam proses pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat berdasarkan pada potensi pribadi, langsung (lewat partisipasi), demokratisasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Titik fokusnya terletak pada aspek kualitas, sebab secara umum *civil society* yang secara luas dituju oleh proses pemberdayaan, akan terasa lebih siap dilakukan lewat isu-isu lokal.

Menurut Pearse dan Stiefel (dalam Moeljarto, 1996:63), menghormati kekhasan lokal, kebhinekaan, desentralisasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipasif. Pemberdayaan partisipasif ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin, termasuk kaum perempuan, bila berhadapan dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Langkah kongkritnya adalah meningkatkan kesadaran politik, sosial ekonomi dan kekuatan kelompok yang lemah, serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.

Melalui pemberdayaan ekonomi dan sekaligus politik, diharapkan akan menempatkan masyarakat pada kondisi yang kuat, dimana *bargaining potition* yang seimbang antara kekuatan-kekuatan dapat terjadi. Ini artinya bahwa pemberdayaan lebih efektif dilakukan secara kolektif. Meskipun pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, namun pemberdayaan kelompok memiliki keunggulan. Dalam pemberdayaan kelompok, anggota masyarakat secara individu dapat saling berdialog untuk menyadari dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pemberdayaan ini dalam proses pembangunan harus memuat strategi dasar yang memadukan dua tujuan sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Dalam aras konseptual, arah pemberdayaan masyarakat miskin, menurut Sumodiningrat (1999:130) hanya efektif apabila ditopang oleh tiga hal, yaitu: (1) pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan mereka; (2) pemantapan ekonomi, dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan hidup, yakni lebih mengembangkan peran serta ketimbang mobilisasi; dan (3) modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Masyarakat pedesaan terutama kaum perempuan, seringkali diberikan julukan sebagai orang-orang bodoh, miskin, dan kurang berdaya mengembangkan segala usahanya, sehingga perlu diberikan program pembangunan guna menaggulangi keadaannya yang tidak baik itu. Mereka lalu menjadi objek pembangunan. Anggapan itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Perempuan desa yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan usaha tani dan dagangnya, sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi yang cukup untuk bisa dikembangkan.

Potensi perempuan di pedesaaan sebenarnya tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas kehadirannya yang melebihi setengah jumlah penduduk, melainkan tak kalah pentingnya adalah kiprahnya yang brgitu menonjol dan besar kontribusinya di bidang sosial ekonomi terutama di sektor pertanian. Penelitian Saliem (1995:21) secara meyakinkan membuktikan, bahwa perempuan petani memiliki kontribusi besar dalam setiap setiap tahap kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pemasaran hasil. Bahkan, Hesti (1993:44), secara eksplosif menyatakan bahwa betapa substansialnya peran perempuan di desa pertanian, sehingga tidak satu buah benih pun yang jatuh ke bumi tanpa sentuhan tangan perempuan.

Demikian pun di sektor industri dan perdagangan, potensi dan kontribusi perempuan cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Besarnya jumlah pekerja perempuan di pabrik-pabrik, semakin banyaknya pelaku ekonomi di sektor informal, dan kiprah perempuan di ruko-ruko serta kios-kios pasar sungguh tidak boleh diabaikan lagi. Mereka menjadi pihak yang tidak perlu diragukan lagi dapat memperkuat bahkan menopang kehidupan ekonomi keluarganya.

Di luar kedua sektor ekonomi di atas, kita dapat berhitung dari hasil kerja perempuan pekerja di berbagai sektor di luar negeri. Perempuan-perempuan TKW yang berasal dari desa-desa, yang kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga ini telah menjadi pahlawan penggerak ekonomi lokal, regional, bahkan nasional, meski peran mereka sering tidak diakui dan diperhitungkan. Sorotan kompas tangal 17 Juni 2002, telah mem-*blow up* sisi kepahlawanan mereka di antara sisi-sisi gelap nasib mereka yang sering menjadi korban kekerasan di tanah rantau. Hitungan kasar menunjukkan, bahwa selama krisis ekonomi, Juli 1997 hingga Juni 2002, tak kurang dari 180 juta dolar Singapura (Rp.900 milyar) ditransfer TKI kita yang bekerja di Singapura saja. Data yang lebih menyeluruh menunjukan, bahwa dalam tiga tahun (2000-2002), menurut catatan Departemen Tenaga Kerja (Kompas, 2002:25), 1,28 juta TKI (yang sebagian besar perempuan desa) mengirim uang kepada keluarga mereka sebesar 3,145 milyar dolar AS, yang kalau dirupiahkan dengan kurs Rp.10 ribu/dollar, maka jumlahnya mencapai Rp.31,45 trilyun. Itu yang dikirim oleh tenaga kerja legal dan tercatat, sedangkan yang *ilegall* menurut Depnaker jumlahnya berjumlah tiga kali lipat dari yang legal.

Potensi perempuan desa tersebut dalam beberapa hal memang perlu dikembangkan agar mereka lebih berdaya lagi. Hal ini bisa dilakukan melalui tiga tahap, yaitu fase partisipatoris, dan fase emansipatoris (Pranarka dan Prijono, 1996:2). Sampai pada fase ketiga, masyarakat diharapkan sudah dapat menemukan eksistensi dan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya (*auto-nomous inovations*).

Untuk sampai pada fase ketiga tersebut, maka setiap usaha yang diarahkan pada pemberdayaan, khususnya perempuan desa paling tidak harus memuat strategi-strategi dasar pemberdayaan yang tepat. Strategi ini pada akhirnya memuat tiga arah, yaitu: *pertama,* pemihakan pada yang lemah dan pemberdayaan mereka; *kedua,* pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan hidup, yakni lebih mengembangkan peranserta ketimbang mobilisasi; dan *ketiga,*modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekoniomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal (Sumodiningrat, 1999:130).

Sehubungan dengan itu, pemberdayaan perempuan di pedesaan dilakukan melalui tiga arah dan tiga pendekatan. Ketiga arah tersebut adalah menciptakan iklim yang menunjang pengembangan potensi masyarakat (*enabling*); memperkuat daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); dan melindungi mereka yang paling lemah agar tidak semakin lemah, mencegah persaingan tak sehat, dan eksploitasi yang lemah oleh yang kuat. Adapun tiga pendekatan yang ditawarkan oleh Soegijoko, (1996:179), yakni terarah kepada yang benar-benar lemah (*targetted*); melalui pendekatan kelompok untuk mempermudah pemecahan masalah bersama; dan pendampingan selama proses pembentukan yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.

Arah dan pendekatan dalam upaya pemberdayaan perempuan desa tersebut dilaksanakan melalui empat dimensi strategis. Keempat dimensi strateis tersebut, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama,* dimensi primer**,** yakni proses pemberdayaan menekankan pada pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini bisa dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembentukan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marden, dalam Pranarka dan Moeljarto, 1996:56).

Kedua, dimensi sekunder, yakni proses pemberdayaan yang menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memberi motifasi individu dan kelompok agar memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri yang menjadi pilihan hidupnya. Dimensi ini bermuara pada pembangunan kualitas manusia sebagai salah satu kunci untuk meraih keberhasilan pembagunan. Melalui proses ini diharapkan masyarakat bisa menganalisis sendiri masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas, dan memperoleh pengetahuan baru. *Ketiga,* dimensi generatif kekuasaan, dimana baik Chambers (1987), Kabeer (1994) maupun Pranaka dan Moeljarto (1996:60), berpendapat bahwa upaya mengatasi ketidakberdayaan masyarakat dengan cara membangun kekuatan yang ada dalam diri setiap orang, karena pada dasarnya kekuatan itu ada, hanya saja perlu ditampakkan dan dikembangkan. *Keempat,* dimensi eksternal dan internal, yakni semua pelaku perubahan harus berpartisipasi memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam memasuki globalisasi. Secara internal, semua pihak harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya seiring dengan masuknya kekuatan-kekuatan global ke dalam kehkdupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan (Pranarka dan Moeljarto, 1996:1).

Di desa Sriwulan organisasi akar rumput begitu banyak terbentuk, termasuk diantaranya mewadahi akitivitas para perempuan (ibu-ibu) sebagai anggotanya. Organisasi-organisasi akar rumput bentukan kaum perempuan tersebut cukup banyak jumlahnya, seperti kelompok-kelompok arisan, kelompok-kelompok pengajian, dan kelompok-kelompok kesenian. Di antara organisasi-organisasi akar rumput tersebut yang paling menonjol, baik jumlah maupun kiprahnya adalah organisasi-organisasi pengajian. Dalam hal ini, banyaknya kelompok-kelompok pengajian sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat agamis (religius).

Kelompok-kelompok pengajian ini terbentuk dalam berbagai nama, tingkat wilayah, dan bentuk aktivitasnya. Ada pengajian ibu-ibu di tingkat RT, RW, dan Desa, ada pula organisasi pengajian ibu-ibu warga Nahdatul Ulama (Pengajian Muslimat) dan organisasi pengajian ibu-ibu warga Muhammadiyah (Pengajian Aisyiyah), serta ada oeganisasi pengajian umum. Kelompok pengajian umum ini diikuti oleh warga secara umum tanpa melihat latar belakang wilayah atau aliran keagamaan.

Hal menarik yang ditemukan, bahwa pengajian yang ada di desa Sriwulan tidak melulu mengadakan kajian dan praktek ritual keagamaan saja, melainkan juga memiliki aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Di antara aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya dikaksud adalah membentuk koperasi, membentuk kelompok industri rumah tangga (*home-industry*), dan kelompok kesenian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat digambarkan berbagai makna yang digali dari kearifan masyarakat di daerah penelitian, khususnya menyangkut pemberdayaan ekonomi perempuan desa melalui organisasi akar rumput. Sebab, menurut Sutopo (1989) studi kasus dalam penelitian kualitatif dapat mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh nuansa. Fokus penelitian ini adalah peran Koperasi Mulya dari pengajian ibu-ibu Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam pemberdayaan sosial ekonomi anggotanya.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yakni desa bercorak peralihan dari kehidupan tradidional kepada kehidupan masyarakat modern. Aspek sosio-kultural desa ini masih menunjukkan sisa-sisa kehidupan lama, seperti masih berlakunya adat-istiadat Jawa yang bersinergi dengan kebudayaan Islam, namun corak kehidupan masyarakatnya sudah menuju kehidupan modern perkotaan, seperti kehidupan yang egaliter dan demikratis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) informan, sebagai sumber data utama digali melalui wawancara mendalam dengan pamong desa, tokoh perempuan (pengurus pengajian), serta anggota pengajian dan pengurus/anggota Koperasi Mulya; (2) tempat dan peristiwa, yakni melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya pada aktivitas kehidupan koperasi mecakupi catatan pertemuan (notulen rapat-rapat pengurus koperasi) dan catatan aset serta laporan rapat anggota tahunan koperasi.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi tiga cara, yaitu wawancara mendalam (*indent interview*) yang berujung terbuka (*open eded*), observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dipakai secara terpadu pada tahap-tahap proses pengumpulan data.

Teknik analisis data penelitian ini mengunakan *interactive model of analysis.* Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penyusunan kesimpulan (*conclusying drawing*) (Miles dan Huberman, 1992:12). Dalam model ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis selama kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung, dan juga sesudah pengumpulan data selesai untuk melengkapi data yang kurang. Pada penarikan kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi, diantaranya dengan cara mencapai *intersubjective consensus* (Nasution, 1988), yang dilakukan dengan mempertemukan para informan kunci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa penelitan ini tidak ada yang menonjol. Tidak ada perbedaan mencolok dengan desa sekitarnya. Namun, sedikit perbedaan yang dapat dikemukakan di sini, bahwa desa-desa Jawa umumnya memiliki stratifikasi sosial yang menncolok, sedangkan di Desa Sriwulan masyarakat terlihat setara. Stratifikasi masyarakat desa ini tidaklah mencolok karena pengaruh pengaruh warga pendatang dari kota yang sangat besar. Artinya strukturasi sosial yang ada terbetuk akibat faktor yang bersifat fungsional dan lebih horizontal. Kelas-kelas sosial tidaklah menonjol sebagaimana masyarakat tradisional pada umumnya. Hal ini bukan berarti bahwa semua warga masyarakat memiliki peran yang sama, melainkan perbedaan peran lebih terlihat pada fungsi masing-masing agen sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, yang juga hal itu dikuatkan juga oleh Kepala Desa bahwa tidak cukup bukti bahwa suatu kelompok masyarakat atau pribadi tertentu memiliki hak istimewa dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Desa dan perangkatnya yang dulu memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan peran ulama desa yang begitu menentukan di masa lalu, kini hal itu mulai surut. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang tokoh agama yang cukup disegani di desa ini, bahwa masyarakat desa ini telah memasuki suatu pola hidup yang egaliter, terbuka, dan berlangsungnya proses demokratisasi sesuai dengan tuntutan zaman.

Sebagai konsekuensi dari perubahan sosial tersebut, maka lapisan masyarakat terbesar tidak lagi para petani, tetapi para buruh. Lapisan masyarakat yang sebagian bekerja sebagai buruh pabrik atau pegawai cukup membuat kesulitan bagi perangkat desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan. Banyak di antaranya yang sulit untuk bergotong-royong dalam kegiatan-kegiatan kampung dengan alasan harus bekerja, dan tidak terkecuali di hari Minggu banyak juga yang kerja lembur atau mencari nafkah tambahan, baik sebagai pengayuh becak, atau tukang ojek, maupun bekerja di sektor informal lainnya. Namun demikian, peneliti sangat heran menghadiri beberapa pertemuan warga, baik di tingkat wilayah (RT/RW) maupun kelompok-kelompok kemasyarakatan, seperti pengajian, kepanitiaan-kepanitiaan, maupun kelompok-kelompok kerja (pengelolaan air minum, misalnya) mereka tampak begitu antusias. Terlebih lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum perempuan, seperti PKK, Dasa Wisma, dan pengajian-pengajian.

Meskipun strukturasi soaial di Desa Sriwulan tidak bersifat hirarkhis, namun pembagian peran sosial tidaklah hilang. Masing-masing peran sosial yang ada tidak dapat begitu saja saling menggantikan. Kelompok peran masyarakat desa ini yang secara substansial mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dapat dikategorikan menjadi 5 status, yakni perangkat desa, tokoh agama (ulama desa), cerdik cendikiawan desa, pengusaha desa, dan warga biasa.

Peran Kooperasi Mulya Kelompok Pengajian Ibu-ibu

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, hasil penelitian berkenaan dengan usaha pemberdayaan sosial ekonomi perempuan pada pra-koperasi Mulya kelompok pengajian ibu-ibu di Desa Sriwulan, dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. *Pertama*, di Desa Sriwulan, koperasi yang dikelola ibu-ibu yang secara umum dipandang kurang kemampuan dan pengalaman. Apalagi koperasi yang didirikan oleh kelompok pengajian. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang pengurus pra-koperasi Mulya, ibu Paimin, yang mengemukakan:

> *"Saat koperasi ini dibentuk dan didirikan masih banyak anggota yang pesimis. Mereka mengaku kawatir kalau-kalau akan gagal. Kami para pengurus pantang menyerah. Kami ingin membuktikan, bahwa kemauan kami adalah modal keberhasilan. Eh..., ternyata sekarang semuanya terbukti. Anggota sudah bisa menikmati hasilnya."*

Persepsi masyarakat, khususnya perempuan Desa Sriwulan kini lambat laun berubah, dari rasa rendah diri menjadi percaya diri. Mereka sudah cukup menyadari potensi dirinya. Mereka percaya diri akan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi, terutama di lingkungan keluarga dan lingkungan desanya. Koperasi ini menyadarkan akan harkat dan potensi perempuan di masyarakat. Kesan itu begitu kuat, dimana mereka begitu semangat ketika ditanya soal posisinya di masyarakat. Secara umum mereka sudah merasa sejajar, duduk sama rendah dan berdiri sama ti nggi dengan kaum laki-laki.

Kondisi ini sangat mungkin terjadi. Salah satu faktor pendukungnya adalah sumber daya manusianya. Rata-rata pengurus dan anggota pengajian ibu-ibu ini banyak yang tergolong berpendidikan menengah ke atas. Mereka adalah warga desa pendatang yang menghuni perumahan Pondok Raden Patah. Di antara pengurus koperasi adalah guru SD dan SLTP, namun ada pula ibu-ibu rumah tanga yang cukup pendidikan. Merekalah yang menjadi penggerak dan pelaksana kegiatan Koperasi Mulya.

Perubahn sosial masyarakat sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusia. Desa Sriwulan, dengan warga pendatang yang rata-rata berpendidikan menengah telah memberikan corak baru dalam berpikir masyarakat. Di samping itu, warga pendatang yang heterogen juga memungkinkan terjadinya diferensiasi cara berpikir dan bertindak. Kenyataan ini dikuatkan oleh pendapat Soekarto (1986:310-311), bahwa pendidikan memberikan suatu nilai tertentu, terutama membuka pemikiran manusia dan menerima pikiran-pikiran baru yang datang dari manusia lain. Sedangkan heterogenitas masyarakat mempermudah konflik sosial, yang pada gilirannya mampu mendorong terjadinya perubahan sosial.

Perubahan sosial atau transformasi, sebenarnya bukan sekedar berubah dari suatu gejala dan bentuk aktivitas tertentu, melainkan ada inovasi di dalamnya, ada proses belajar yang otentik. Hakikat transformasi juga bukan sekedar berubah karena mencontoh apa yang dilakukan masyarakat atau bangsa lain yang dianggap telah maju, melainkan lebih dari itu mesti ada proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Transformasi bukan berubah akibat meniru, melainkan menemukan potensi yang dimiliki untuk menjawab persoalan secara mendasar.

Pembangunan masyarakat kita sering kali gagal, karena kita tidak mampu menemukan nilai-nilai sendiri dalam pembangunan. Kita sejak merdeka terus menerus menerima dan memakai cara bangsa lain berkembang, ternyata itu semua tidak cocok dengan hakikat pembangunan bangsa dan masyarakat kita yang memilliki nilai-nilainya sendiri. Inilah makna pembangunan sebagai transformasi dan bukan sekedar pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi semata.

Masalah pembangunan di negara-negara berkembang, menurut Korten (1993: 6-8) adalah transformasi, yaitu terjadinya perubahan dalam pranata-pranata, nilai-nilai, dan perilaku sesuai dengan realitas ekologi dan sosial kita sendiri. Hal yang terpenting dari semua itu adalah tumbuhnya akan harga diri. Untuk menyadari sepenuhnya harkat kemanusiaan dirinya, orang harus memiliki rasa harga diri yang berasal dari kesadaran, bahwa dirinya adalah penyumbang yang produktif dan dihormati dalam masyarakat.

Ini menyangkut masalah ketercakupan, dimana setiap orang perlu diberikan kesempatan menikmati status dan kekuasaan yang sama, dimana kaum perempuan juga ditempatkan sejajar dengan kaum laki-laki dalam pergaulan sosial. Ketercakupan dalam konteks hidup bermasyarakat berarti bahwa setiap orang mendapat kesempatan untuk menjadi penyumbang yang dihormati bagi keluarga, kelompok dan masyarakatnya. Tidak memandang laki-laki atau perempuan, berhak merasa menjadi bagian dari komunitas yang berharga diri. Ketercakupan juga bermakna keadilan sosial, yakni memperhatikan siapa saja yang berdaya maupun tidak berdaya.

Hasil dari upaya Koperasi Mulya yang dipelopori oleh kaum perempuan peserta pengajian ini ternyata bukan sekedar membuka wacana dan cara pandang baru di desa ini. Bukan sekedar memunculkan wacana tentang transformasi di dalam mastarakat atau komunitasnya. Kegiatan mereka secara sosial ekonomi ternyata telah mampu memberikan alternatif baru tentang pola kegiatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Kegiatan usaha dan program layana bagi anggota yang dilakukan Koperasi Mulya mengubur kesan koperasi selama ini yang cenderung negatif, dengan plesetan istilah koperasi menjadi "kuperasi." Artinya, selama ini koperasi hanya bergerak untuk menguntungkan sebagian pengurusnya, yakni dengan cara memeras anggota untuk partisipasi (seperti memaksa berbekanja meski harganya lebih mahal dari harga pasar). Berbeda dari koperasi yang lain, Koperasi Mulya memiliki sistem pembagian keuntungan sendiri. Melalui sistem bagi laba (SHU) secara langsung lewat buku tabungan. Kopersi ini mampu membagun kepercayaan baru dan sekaligus mendorong anggota untuk berpartisipasi secara sukarela. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Budi Riyanto (ketua), sistem SHU bagi langsung itu sebagai berikut:

> *"Sistem pembagian SHU di koperasi kita sangat baik. Utamanya untuk kesejahteraan anggotanya. Pembagian itu adalah: (1) 20% untuk pelaksana/tenaga operasional; (2)* 30% langsung dimasukkan ke buku tabungan anggota saat berbelanja*, yang bisa dicairkan/diambil pada akhir tahun; dan (3) 50% untuk biaya administrasi dan pemupukan modal, yang bisa diambil jika anggota berhenti menjadi anggota."*

Sistem pengaturan dan pengelolaan koperasi ini dipandang sangat bijaksana, sebab mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan rela berkorban (mengelola usaha secara sosial atau sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT). Pandangan semacam itu diperoleh anggota dari kegiatan pengajian rutin setiap bulan. Anggota dan pengurus merupakan satu kesatuan kesadaran dan tujuan mulia beribadah kepada Allah SWT.

Koperasi Mulya, menurut pandangan hampir semua anggota dan pengurusnya, tak disangsikan adalah lembaga ekonomi rakyat berjiwa sosial dan kemandirian. Berjiwa sosial, karena jerih payah pengurus dilandasi nafas dan ibadah kepada Allah, sehingga tanpa digaji pun tetap secara sukarela dan sungguh-sungguh melayani kebutuhan anggotanya. Sikap sukarela ini dipupuk dan didorong terus oleh ustadz/ustadzah secara terus menerus, dari forum pengajian ke forum pengajian berikutnya. Salah satu bentuk pengorbanan sukarela dari pengurus dilakukan oleh Bu Paimin, ia dan keluarganya merelakan salah satu kamar depan rumahnya untuk kegiatan usaha koperasi. Tentu tanpa uang sewa.

Kemandirian merupakan jiwa atau ciri Koperasi Mulya berikutnya. Kemandirian dimaknai oleh anggota dengan membayar iuran atau menabung untuk menambah modal usaha. Anggota yang mampu menabung hingga seratus ribu rupiah atau lebih, sedangkan yang tidak mampu cukup dengan sepuluh ribu rupiah. Dengan modal yang berbeda itu semua anggota tetap memperoleh perlakuan (hak dan kewajiban) yang sama. Mereka yang menabung sedikit boleh saja belanja banyak menurut kebutuhannya, asal sebulan berikutnya mampu melunasinya.

Oleh pengurus, kemandirian dimaknai dengan mengurus koperasi tanpa bantuan tenaga tetap yang dibayar. Pengurus dengan sukarela kulakan dengan transportasi milik pribadi. Misalnya, ketika pulang dari mengajar Bu Paimin mampir di toko Alfa membeli barang-barang dagangan yang dibutuhkan anggota. Ia menggunakan kendaraan sendiri tanpa memperhitungkan berapa liter bensin dibeli untuk menjalankan sepeda motornya.

Kenyataan demikian membuat semua anggota merasa puas. Ibu Joko misalnya, ketika ditanya tentang layanan koperasi terhadap anggota selama ini, dengan tegas menyatakan puas dengan kinerja pengurus. Ia menuturkan, ketika anaknya butuh sepeda, maka ia dapat membelinya dengan meminjam dana dari koperasi. Ia mengangsur sepeda itu selama lima bulan. Ia sangat terbantu dengan keluwesan pengurus. Sebab, ia cukup menyerahkan kwitansi pembelian kepada pengurus setelah menerima uang, yang langsung ia belikan sendiri sepedanya di toko. Maklum, pengurus waktunya terbatas. Semua saling percaya dan menyadari keterbatasan masing-masing.

Fenomena seperti ini banyak pula ditulis oleh para pakar pembangunan di negara-negara berkembang yang meneliti aktivitas organisasi-organisasi non-pemerintah. Korten (1993:165-166), misalnya menuturkan, bahwa kebanyakan organisasi rakyat atau organisasi akar rumput (*grassroot organization*) menurut sebutan Norman Uphoff, memiliki tiga ciri, seperti yang dimiliki oleh organisasi pengajian ibu-ibu di Desa Sriwulan, yaitu: *Pertama,* merupakan asosiasi saling menguntungkan yang mendasarkan keabsahan pada kemampuan melayani kepentingan para anggotanya. Peran organisasi ini adalah melayani anggota, dan bukan melayani stafnya. *Kedua,* organiasasi ini juga mampu bergerak dengan kewenangan akhir pada para anggotanya di atas para pemimpinnya. *Ketiga,* mampu berswadaya dalam arti kelangsungan keberadaannya tidak tergantung pada inisiatif dan dana dari luar.

Koperasi Mulya sebagai koperasi yang dipelopori oleh kaum perempuan bertujuan untuk menolong pemenuhan kebutuhan kaum perempuan pula. Umumnya, kaum perempuan dalam keluarga selalu dikaitkan dengan kebutuhan kerumahtanggaan, seperti kebutuhan dapur (terkait dengan bahan dan alat masak-memasak), kasur (terkait dengan kebutuhan kamar tidur, termasuk berhias), dan sumur (terkait dengan kebersihan atau MCK).

Kebutuhan-kebutuhan dapur, kasur, dan sumur ini masih sangat diyakini oleh peserta pengajian ibu-ibu di Desa Sriwulan sebagai kebutuhan dasar perempuan, kebutuhan-kebutuhan inilah yang berusaha akan dipenuhi dari layanan koperasi yang mereka bentuk. Menurut salah seorang anggotanya, yaitu ibu Mardinah, bahwa koperasi ini sangat ,membantu ketika kaum perempuan dalam kesulitan memenuhi kebuuhannya, terutama yang berekonomi lemah. Ketika wawancara tanggal 29 Juli 2002, ibu Lilik menuturkan hal itu.

> *"Sebagai ibu rumah tangga, saya harus selalu siap dengan kebutuhan harian keluarga. Namun, saya sering "ketlesek", kehabisan uang. Saat itulah saya rasakan keberadaan Pra-Koperasi Mulya. Biasanya saya lengsung ke Ibu Paimin, ambil barang-barang secukupnya, lalu minta dicatat. Bayarnya tunggu suami saya gajian. Maklumlah saya kan ibu rumah tangga".*

Penuturan semacam itu juga disampaikan oleh ibu-ibu anggota yang lain. Mereka merasa koperasi ini benar-benar milik mereka. Bukan milik pengurus atau yang lainnya. Sistem membayar di belakang ini memang sering beresiko juga, yaitu jika ada anggota yang tidak tepat waktu melunasi hutangnya. Namun demikian, anggota sangat keberatan kalau sistem ini diubah. Cara ini menjadi pilihan semua anggota, sebab jika ada yang menunggak, maka anggota yang bersangkutan bisa mengangsurnya.

Pandangan semacam ini memang tidak aneh di kalangan rakyat. Mereka sudah biasa saling membantu. Kalangan organisasi rakyat (akar rumput) sudah akrab dengan sistem ini, khususnya di desa-desa. Gejala semacam ini ternyata tidak hanya bersifat lokal, tetapi mungkin berlaku secara nasional, bahkan global. Buktinya, desa-desa di India, Kenya, Filipina, dan Pakistan hal itu juga biasa terjadi. Norman Uphoff (1993), dalam artikel hasil penelitiannya di negara-negara itu, menuturkan kondisi serupa. Di Pakistan Utara, misalnya, setengah juta penduduk melalui organisasi pedesaan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka bahu-membahu mengupayakan air bersih dengan pembiayaan yang kecil dalam area yang menampung lebih dari 100 ribu orang.

Organisasi-organisasi akar rumput semacam itu biasanya bekerja atas dorongan pihak luar, dari bantuan-bantuan lembaga internasional. Namun demikian, tidak sedikit yang bekerja atas dorongan mereka sendiri. Organisasi-organisasi inilah yang menjadi agen transformasi. Robert Chambers (1988: 110), misalnya mengemukakan pengalamannya di desa-desa di Filipina. Ternyata komunitas desa pun memiliki apa yang disebutnya "*natural knowladge*" atau "pengetahuan orang desa". Korten dan Uphoff menyebutnya sebagai "*ethno-science*" dengan terjemahan "ilmu rakyat" atau "pengetahuan lokal" saja. Pengetahuan semacam ini dibangun dari pengalaman dan hasil belajar berpuluh-puluh tahun secara turun-temurun. Cirinya adalah kepraktisan dan kesederhanaan.

> *"Pengetahuan rakyat desa, dapat ditopang dan ditingkatkan oleh kekayaan dan ketajaman pengamatan yang tidak ditemui dalam ilmu pengetahuan "orang luar". Hal ini disebabkan kemampuannya menggunakan sejumlah pengalaman hidup dan lebih banyak penginderaan dibandingkan dengan ilmuwan moderen (Chambers, 1998:116).*

Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, maka Chambers menyarankan agar para ilmuwan sosial, khususnya sosiolog pedesaan, mau duduk berama, mendengarkan, dan belajar (berguru) dari penduduk desa. Kemudian merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang dapat dikerjakan bersama mereka, dan bukan terlalu bersemangat untuk menolong mereka. Seperti orang perempuan Aborigin Australia bilang: "Jika anda datang untuk membantu saya, anda boleh pulang saja. Namun, jika anda anggap perjuangan saya sebagai bagian dari pergulatan anda sendiri untuk mempertahankan diri, barangkali kita bisa bekerjasama" (Korten, 1993:220).

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasannya, dapatlah dikemukakan simpulan penelitian ini. *Pertama*, keberadaan Koperasi Mulya di Desa Sriwulan yang dibangun oleh kelompok pengajian ibu-ibu merupakan gambaran usaha pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Kelompok pengajian ibu-ibu desa Sriwulan dapat dikategorikan sebagai sebuah organisasi rakyat atau organisasi akar rumput (*grassroots organization*), sebab sifat kegiatannya yang memberikan layanan umum kepada masyarakat (anggotanya) dan dilakukan pada lingkup wilayah setempat (lokal). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Mulya, baik yang dilakukan oleh para pengurus maupun anggotanya, dapat dikatakan memiliki dimensi pemberdayaan sosial ekonomi kaum perempuan desa. Hal itu tergambar dari persepsi anggota-anggotanya, bahwa keberadaan koperasi ini mampu membuka kesadaran dan cara pandang baru kaum perempuan desa. Kegiatan berkoperasi bagi mereka diyakini mampu membangkitkan rasa percaya diri, harga diri, dan aktualisasi dirinya.

Kedua, usaha-usaha yang dulakukan oleh Koperasi Mulya, baik oleh anggota maupun pengurus dalam memberdayakan kaum perempuan desa di bidang sosial ekonomi telah memberikan nuansa transformasi sosial. Transformasi sosial ini dipicu oleh kegiatan-kegiatan yang memberdayakan (membangkitkan) kesadaran potensi sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut antara lain: (1) membangun rasa percaya diri dan harga diri perempuan terhadap kemampuannya mengembangkan koperasi; (2) membina dan mengembangkan aktivitas produktif di bidang sosial ekonomi kaum perempuan desa; (3) memberdayakan kaum perempuan ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Mencermati simpulan yang telah dipaparkan, maka perlu disarankan: *pertama,* pengurus Koperasi Mulya untuk segera mengusahakan peningkatan status dari koperasi persiapan kapada koperasi yang berbadan hukum. Status badan hukum akan memungkinkan koperasi ini mengakses sumber-sumber permodalan, seperti perbankan, Badan Usaha Milik Negara, dan perusahaan suasta yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan usaha perkopersian; *kedua*, koperasi ini, meskipun memiliki keterbatasan modal, dipandang akan lebih memberdayakan anggotanya apabila melakukan kegiatan usaha simpan pinjam untuk modal usaha di samping masih menekuni usaha untuk pemnyediaan sembako (sembilan bahan pokok). Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, bahwa kebutuhan modal usaha untuk kegiatan produktif rumah tangga sangat besar, terutama bagi ibu-ibu "bakul" atau pedagang kecil yang akan meningkatkan usaha mereka. Misalnya, penjual ikan segar yang ingin menyelamatkan ikan-ikan dagangan yang tidak habis terjual dengan memasaknya menjadi ikan presto atau ikan panggang, sehingga tidak membiarkan ikan-ikan itu membusuk. Dalam hal ini mereka membutuhkan modal kecil untuk membeli panci presto atau tungku pengasapan.

DAFTAR RUJUKAN

Chambers, Robbert, 1992. *Participatory Rural Appraisal* (*Memahami Pembangunan Desa Dari Belakang*),